



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY JUNAEDI
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 240107

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 18.314.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 6.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 11980 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 359.400.000
4. Tanah Seluas 6520 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , WARISAN Rp. 195.600.000
5. Tanah Seluas 1990 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 59.700.000
6. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 6.500.000.000
7. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
8. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 635.000.000

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 Tahun 2021, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.



620.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	195.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	19.172.700.000
III. HUTANG	Rp.	910.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.262.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.